



Pelantikan Wali Kota Yogyakarta Condong di 6 Februari 2025

YOGYA, TRIBUN - Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta hasil Pilkada 2024 kemungkinan bakal dilaksanakan 6 Februari 2025. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogya menunggu Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar pelantikan.

Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogya, Erizal menjelaskan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogya kemungkinan ikut jadwal pelantikan awal. Sebab, di Kota Yogya tidak ada Perse-

lisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mendagri menawarkan beberapa opsi, cuma disimpulkan dipilih opsi satu, yaitu tanggal 6 Februari, semuanya dilantik oleh presiden di hari yang sama," tandas Erizal, Kamis (23/1).

"Terus, nanti yang bersengketa ada kloter berikutnya, habis putusan MK. Kalau ada yang PSU atau pemungutan suara ulang, nanti beda lagi pelantikan-

nya. Kota Yogya ikut kloter pertama, karena tidak ada sengketa," urainya.

Meski demikian, ia mengungkapkan, bahwa KPU sampai sejauh ini masih menantikan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar pelantikan. Pasalnya dalam Perpres semula, pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijadwalkan 10 Februari. Namun, dalam RDP disepakati semua disamakan, menjadi tanggal

• ke halaman 11

Pelantikan Wali Kota

• Sambungan Hal 1

6 Februari di Ibu Kota Negara.

"Tetap masih menunggu Perpres, harus dikuatkan dengan Perpres, karena dalam undang-undang pemerintahan daerah dilantik oleh presiden kan, maka perlu Perpres kalau pelantikan mau dilakukan 6 Februari," katanya.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Danang Setiadi mengungkapkan, pihaknya siap mengikuti jadwal pelantikan yang telah disepakati, baik pada 6 Februari maupun 10 Februari 2025. "Kesiapan, insyaallah, kita oke, mau tanggal 6 atau 10 siap," ujar Danang, Kamis (23/1).

Menurut Danang, pelantikan pada 6 Februari rencananya akan dilaksanakan di Jakarta secara terpusat, sesuai keputusan pemerintah pusat dan penyelenggara pemilu. Namun, Pemda DIY tetap menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata cara pelantikan kepala daerah.

"Kalau pelantikan 6 Februari itu, kemarin kesepakatan dilantik di Jakarta semua. Makanya, kita masih menunggu seperti apa isi perpres yang baru," jelasnya.

Meski begitu, Pemda DIY telah mempersiapkan skenario pelantikan lain sesuai ketentuan Perpres sebelumnya, yang mengatur pelantikan oleh gubernur di daerah. "Kami sudah siap-siap, sesuai perpres lama itu di bangsal oleh gubernur, itu kita sudah siapkan," tambah Danang.

Dengan adanya keputusan terbaru terkait pelantik-

an serentak di Jakarta pada 6 Februari, Pemda DIY bergerak cepat untuk menyesuaikan rencana. "Kami sudah bertemu dengan kabupaten/kota untuk mempersiapkan dua skenario, baik pelantikan di Jakarta maupun di daerah," ungkapnya.

Jangan sampai ditunda

Wakil Ketua DPRD Kota Yogya, Sinarbiyat Nujanat berharap, pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogya tidak mengalami penundaan jadwal. Menurut-nya, Februari menjadi waktu paling pas untuk melantik kepala daerah definitif, karena Kota Yogya sudah terlalu lama dipimpin Penjabat Wali Kota.

"Harapannya tetap sesuai dengan jadwal lah, Februari sudah dilantik, karena dengan Penjabat Wali Kota ini kan punya banyak keterbatasan," tandas Sinar, Kamis (23/1).

"Karena secara regulasi dan kebijakan strategis harus izin sampai Kementerian Dalam Negeri, sehingga membutuhkan waktu yang akhirnya memperlambat proses," imbuhnya.

Dijelaskan, keberadaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogya definitif sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan problem yang tergolong urgen. Misalnya, terkait percepatan penanganan masalah sampah yang terus menjadi sorotan publik, hingga penataan organisasi di lingkungan Pemkot Yogya.

"Ketika ada pegawai yang menjelang pensiun atau sudah pensiun, kan perlu penataan, agar pemerintah bisa segera running menyelesaikan beberapa problem yang masuk skala prioritas," cetusnya.

DPRD Kota Yogya sudah menerima SK permohonan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogya dari KPU pada 10 Januari 2025. Akan tetapi, pihaknya belum menerima kepastian jadwal dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI tempo hari.

"Tanggal 22 (Januari) rencana mau menginformasikan kepastiannya. Tapi, sampai hari ini saya belum memperoleh. Jadi, kami masih menunggu kepastian jadwal," ungkap Politikus Partai Gerindra itu.

Ada kekhawatiran

Wali Kota Yogya terpilih, Hasto Wardoyo mengaku ada kekhawatiran jika jadwal pelantikan mundur terlalu jauh dari bulan Februari. Hal itu dilatarbelakangi oleh pembahasan rancangan APBD 2026 yang biasanya sudah bergulir bersama kalangan legislatif sejak awal tahun.

"Minusnya itu kan kita tidak bisa ikut secara formal untuk merencanakan anggaran di tahun 2026, kalau seandainya (pelantikan) terlalu mundur. Itu salah satu kekurangannya," katanya.

Berdasar pengalamannya menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, proses penganggaran bisa mulai disusun sejak awal bulan Maret. Oleh sebab itu, ia tidak menampik, ada sedikit kekhawatiran program-program yang telah disiapkan berpotensi ketinggalan gerbong anggaran.

"Kalau sampai itu sudah close, ada khawatir juga. Karena ada beberapa program yang perlu kita jelaskan, untuk disusun bersama. Tapi, dalam posisi sekarang be-

lum bisa kita jelaskan, takut kesannya tergesa-gesa ingin menjabat," tandasnya.

Selain itu, seharusnya, kepala daerah terpilih bisa ikut mencermati hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kalurahan yang dibawa ke tingkat kecamatan dan Bappeda. Pencermatan diperlukan untuk menarik usulan dari warga masyarakat yang bisa ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh Pemkot Yogya.

"Saya juga berharap pada pemerintahan yang sekarang bisa mengedepankan *money follow* program, uang mengikuti program, bukan uang mengikuti fungsi. Lebih baik ada program utama yang dikedepankan dan di-support dengan anggaran. Saya kira sampah harus menjadi prioritas utama," cetusnya.

Wakil Wali Kota Yogya terpilih, Wawan Harmawan, mengaku masih menunggu kepastian jadwal pelantikan. "Hasil RDP Mendagri dan DPR RI kan tanggal 6, tapi tadi di Kepatihan masih mengacu kalau pelantikan wali kota dan bupati ada di tanggal 10 Februari," katanya.

Wawan mengaku sudah siap dengan segala kemungkinan. Namun, karena berkaitan dengan berbagai program yang harus segera dijalankan di tataran eksekutif, ia berharap pelantikan bisa digelar secepatnya.

"Intinya, kami sudah mempersiapkan, baik itu untuk pelantikan di Jakarta tanggal 6 Februari, atau oleh Bapak Gubernur pada 10 Februari. Lebih cepat lebih baik, agar kita bisa segera menjalankan program-program yang sudah disusun untuk Kota Yogya," kata Wawan. (aka/han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005